

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam praktiknya mempunyai identitas yang melekat, tentu berpengaruh pada tindakan atau sikap sehari-hari dalam praktiknya. Identitas yang berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari yaitu identitas budaya. Melalui identitas budaya yang dimiliki tentu fungsi Humas dalam Pemerintah Kabupaten Sumedang akan berpengaruh pada kegiatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Identitas budaya dimiliki oleh setiap individu biasanya berasal dari kesamaan sejarah atau akar budaya yang biasanya dijadikan aturan dalam bersikap dan bertingkah laku. (Sabbah and Ayuningtyas 2018).

Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari bidang IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) dibawah Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Diskominfo Sanditik). Mempunyai peranan penting untuk menjalankan fungsinya sebagai fasilitator informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada publik (Melani Rahmadanty, Ernita Arif 2019). Sebagai mana mestinya Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Penjelasan di atas diperkuat berdasarkan data pra penelitian dikutip dari website TiNewss.com Rabu, 5 Januari 2022 yang telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Demisioner Kusubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Setda Kabupaten Sumedang pada periode 2021. Mengenai adanya kebijakan Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Kebijakan tersebut menjelaskan mengenai pemindahan tugas Humas yang sebelumnya berada di Humas dan Protokol Setda. Kemudian di pindah tugaskan ke bagian Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sanditik, dilakukan bertepatan dengan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada 31 Desember 2021. Sehingga sampai penelitian ini dilakukan, Humas Setda dibagi menjadi dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Terdapat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang ditempatkan pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tupoksi sebagai pelaksanaan atau persiapan komunikasi dan dokumentasi pimpinan. Sedangkan fungsi kehumasan berada di Bidang IKP Diskominfo Sanditik yang bertugas memberikan pelayanan informasi dan komunikasi mengenai pemerintah kepada masyarakat.

Melalui penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk mengamati praktiksi Humas di Kabupaten Sumedang. Sehingga penelitian ini dibuat untuk mengetahui langkah yang dilakukan Pranata Humas Kabupaten Sumedang untuk membuat organisasinya tetap berjalan dengan baik menjalankan fungsional kehumasannya. Selain itu karena terdapat ciri khas menarik dari Kabupaten Sumedang mengenai kebudayaan sundanya maka peneliti mengamati identitas budaya yang terdapat pada Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui perspektif nilai dan karakteristik budaya. Karena Nilai merupakan suatu pedoman yang biasa digunakan oleh setiap individu salah satunya berfungsi untuk mengatur kehidupan, tindakan, pikiran, dan lain-lain (Pujaastawa 2015). Sehingga implementasi budaya yang dilakukan oleh Pranata Humas dijadikan sebagai pedoman nilai dalam bertingkah laku untuk menjalankan fungsionalnya.

Humas Pemerintah dalam aktivitasnya dituntut dapat membentuk pemahaman, nilai-nilai, dan tingkah laku masyarakat agar sejalan dengan visi atau misi pemerintah serta humas pemerintah juga dituntut untuk membangun hubungan baik dalam menjaga citra dan reputasi pemerintah (Maulidia 2020). Melihat masyarakat di Kabupaten Sumedang mayoritas sebagai suku sunda asli, Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam praktiknya diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang berada di lingkungan pedalaman masih kental dengan budaya lokal terutama dalam bertingkah laku dan berbahasa. Dengan memahami dan mengimplementasikan budaya lokal pada identitasnya akan memudahkan praktiksi Humas untuk beradaptasi dan menciptakan pemahaman yang sama (*shared meanings*) dalam mengkomunikasikan pesan pemerintah atau suatu kebijakan kepada masyarakat.

Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengamati praktiksi Humas di Kabupaten Sumedang dalam identitasnya sendiri apakah masih menanamkan nilai-nilai budaya lokal. Fenomena mengenai Kabupaten Sumedang merupakan pusatnya budaya Sunda di Provinsi Jawa Barat dilatar belakangi oleh hal unik yang berbeda

dengan Kabupaten lainnya di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang masih menghormati dan juga memelihara kebudayaan sunda, bahkan masyarakatnya dalam bertingkah laku sehari-hari menggunakan tata krama Bahasa Sunda halus. Sehingga bagi seorang Humas Kabupaten Sumedang perlu sekali memperhatikan budaya lokal agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan kebijakan.

Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda mulai di canangkan pada masa kejayaan yang di pimpin oleh Pangeran Angka Widjaya atau Prabu Geusan Ulun, karena sebelumnya Kabupaten Sumedang merupakan kerajaan yang bernama Tembong Agung dipimpin oleh Prabu Hadji Adji Putih. Kemudian nama kerajaan berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang saat masa pimpinan Prabu Tadjimalela. Pada 22 April 1579 Prabu Geusan Ulun dinobatkan Prabu (Raja) oleh Prabu Siliwangi dengan diberikan penyerahan sebuah mahkota binokasih sebagai identitas Sumedang. karena dinyatakan layak sebagai pusatnya budaya sunda dan juga layak sebagai penerus dari kerajaan padjajaran. Tanggal tersebut juga merupakan ditetapkan hari jadi Sumedang sebagai titik awal terbentuknya pemerintahan dari Kabupaten Sumedang (S. 2011).

Bukti Kabupaten Sumedang menjadi penerus dari Kerajaan Padjajaran yaitu melalui mahkota binokasih yang terdapat di Museum Prabu Geusan Ulun. Mahkota binokasih disimpan dan dijaga dengan baik karena merupakan warisan budaya leluhur dan juga sebagai identitas Sumedang, gambar dibawah ini merupakan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat warisan budaya sunda di Kabupaten Sumedang.



Gambar 1. 1 (Mahkota Binokasih)

Sumber : (Dokumentasi Peneliti)

Rumusan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah di era globalisasi yang semakin meningkat ini. Maka dengan mencanangkan SPBS didalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat membangun kembali kehidupan tatanan sunda supaya bisa terus dilestarikan oleh tiap generasi yang ada di Kabupaten Sumedang (Denny Nugraha et al. 2022). Nilai-nilai yang dibuat oleh pemerintah dan dijadikan sebuah kebijakan diantaranya berasal dari naskah kuno. Naskah kuno merupakan salah satu warisan budaya sunda dari leluhur Kabupaten Sumedang yang dijaga sangat baik dan disimpan di Perpustakaan Museum Prabu Geusan Ulun.

Naskah kuno ditulis dengan huruf arab pegon jika dibaca mempunyai makna bahasa sunda yang didalamnya berisi mengenai sejarah, wawacan, nasihat mengandung makna nilai-nilai budaya. Sehingga nilai tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat pada masa Kerajaan Sumedang Larang. Saat ini nilai tersebut dilestarikan sebagai warisan budaya sunda oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk

mempertahankan wilayahnya sebagai tatanan sunda yang dilandaskan pada kebijakan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS).



Gambar 1. 2 (Naskah Kuno)

Sumber : (Dokumentasi Peneliti)

Kebijakan pemerintah mengenai Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS) terdapat nilai-nilai yang harus diimplementasikan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Tercantum pada PERDA Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dalam pasal 3 point 1 dan 2 yaitu dalam kebijakan Pemerintah Daerah mengenai SPBS terdapat tiga nilai yang harus diimplementasikan. Pertama adalah nilai filosofis yaitu “*Insun Medal Insun Medangan*” mempunyai arti Insun (insan/diri/seorang diri) medal (lahir) dan madangan merupakan (cahaya penerang) maka diharapkan setiap individu sebagai penduduk dari Kabupaten Sumedang keberadaannya harus menjadi cahaya pada lingkungannya. Cahaya tersebut dimaknai dengan tekad yang berusaha memberi gagasan ide dan karya nyata tanpa pamrih bagi lingkungan dan juga negara.

Nilai manajerial yang terkandung pada kebijakan SPBS yaitu “*Rawayan Jati Sunda*” merupakan jati diri yang harus dijaga oleh Masyarakat Sumedang sebagai orang Sunda dalam proses untuk mewujudkan tujuan pemerintah agar bisa mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, agamis, dan demokratis (Sumedang Sehati). Selanjutnya nilai filosofis “*Dasa Marga Raharja*” merupakan tingkah laku yang harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang untuk diimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari yaitu : Taqwa, *Someah*, *Surti*, *Jembar*, *Brukbrak*, *Guyub*, *Motekar*, *Tarapti*, *Junun-Jucung*, dan *Punjul Luhung*.

Berdasarkan hasil pertimbangan, peneliti tertarik untuk meneliti budaya yang diimplementasikan oleh praktisi Humas pemerintah Kabupaten Sumedang melalui nilai operasional yang terdapat pada Kebijakan SPBS 2020. Melalui nilai budaya tersebut dapat membantu Pranata Humas dalam praktisinya untuk mewujudkan *mutual understanding* dan masyarakat dapat mengerti, maka Humas harus bisa beradaptasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal dalam menjalin hubungan baik. Karena Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam praktisinya tidak akan mungkin bekerja sendiri tanpa adanya budaya, melalui budaya akan menciptakan sudut pandang dalam berasumsi dan meningkatkan kepercayaan lingkungannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gandhi dan Razak (2021) dengan judul “Praktek Kehumasan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Perspektif Budaya Societal Provinsi Sumatera Selatan”, memberikan hasil yaitu melalui perspektif budaya global dan lokal dari Provinsi Sumatera Selatan dapat membuktikan bahwa praktek humas DPRD lebih transparansi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan informasi kepada publik dan tentunya nilai-nilai budaya masyarakat dengan sangat baik terlibat dalam pelaksanaan fungsi humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa melalui teori *excellence* praktek kehumasannya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini mempunyai kesamaan melihat bagaimana praktisi humas pemerintah menjalankan tugasnya yang dilihat melalui perspektif global berdasarkan *Hofstede's model*, dan juga perspektif budaya lokal. Tetapi yang menjadi pembeda penelitian diatas dilihat dari nilai budaya Sumatera Selatan sedangkan penelitian ini berdasarkan nilai budaya Sumedang atau Sunda yang berpacu pada nilai operasional di Kebijakan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda.

Budaya dinilai penting bagi praktisi humas karena budaya dapat membentuk proses komunikasi dan sebaliknya komunikasi juga dapat membentuk suatu budaya. Bagi humas dalam memahami budaya yang ada itu penting karena budaya dapat menjadi sebuah norma atau aturan yang dapat dipatuhi dalam aktivitasnya (Frame and Ihlen 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sriramesh (1996) Humas di negara China mempunyai saluran dan juga komunikasi yang berbeda karena

pemerintah China lebih ketat dan mempunyai budaya tersendiri. Budaya Praktisi Humas di negara China yang merupakan salah satu dari Benua Asia, bahwa masyarakatnya didasarkan pada hubungan yang tidak setara karena orang-orang dengan tingkat rendah akan berutang rasa hormat dan juga kepatuhannya melalui perlindungan atau imbalan yang sudah diberikan.

Beralih ke negara Selandia Baru dan Australia yang merupakan bagian dari Benua Australia menurut (Hofstede 1983,1985) mengklasifikasikan kedua negara tersebut sama-sama sebagai negara *maskulin* dan *individualitas* yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri serta ketegasan dijadikan sebagai norma. Beralih ke negara Norwegia yang merupakan bagian dari Benua Eropa menurut (Hofstede, 2001, n.d.) secara tradisional masyarakatnya telah menerepakan *egaliter* dengan budaya politik yang terbuka dan tingkat konflik yang rendah, karena merupakan negara yang kecil sehingga praktisi humas mempunyai jaringan yang cukup luas baik politik ataupun media. Sedangkan melihat hubungan praktisi humas dengan budaya negara Brazil telah mencapai tingkat profesional yang cukup signifikan. Budaya yang diimplementasikan pada kehidupan masyarakatnya yaitu menerapkan tindakan bertanggung jawab secara sosial. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa dalam Humas atau PR global masing-masing disetiap negara mempunyai budaya yang berbeda dan pengaruh yang berbeda juga pada praktisi yang dijalankannya.

Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Kandari (2011) dan Gaither berjudul "*Arabs, the west and public relations : A critical/cultural study of Arab Cultural values*" temuan dari penelitian ini yaitu melihat kebudayaan arab yang menekankan pada kekuasaan, identitas, dan budaya melalui sudut pandang model sirkuit budaya yang digagas oleh Paul De Gay tujuannya yaitu untuk dijadikan pedoman praktisi *public relations* dalam mengamalkan nilai-nilai budaya arab pada aktivitasnya. Persamaan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu mengamati nilai-nilai budaya yang kemudian akan diimplementasikan oleh praktisi PR dalam menjalin hubungan baik dan sebagai pelayanan informasi kepada publik. Melalui nilai-nilai budaya akan membantu praktisi humas sebagai fasilitator komunikasi, *problem solving process facilitator*, dan *technical communication* (Tamam 2020).

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat identitas budaya Praktisi Pranata Humas Kabupaten Sumedang yang mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut serta mewujudkan peraturan serta visi dan misi pemerintah, diharapkan dapat menjalin hubungan baik dan menyampaikan informasi serta komunikasi kepada masyarakat dengan beradaptasi melalui nilai-nilai budaya lokal. Terutama Pemerintah Kabupaten Sumedang melihat dari sejarah, budaya tradisi, dan hal lainnya menetapkan Kabupaten Sumedang pada “Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda” yang ditetapkan sejak 16 Januari 2020 hingga sekarang. Tujuannya untuk menjadikan budaya sunda sebagai landasan etika moral dan upaya dalam mengembangkan, melindungi, serta memanfaatkan budaya sunda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain itu dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada kebijakan SPBS dapat mengubah tingkah laku masyarakat yang *individualisme* dan juga *konsumtif* akan menjadi masyarakat yang produktif, berjiwa sosial, dan berjiwa luhur pada tradisi dan budaya yang ada.

Melalui penelitian ini peneliti ingin mengamati bagaimana Praktisi yang dilakukan Pranata Humas untuk melaksanakan tugas serta fungsinya pada SOTK yang baru ditetapkan, berdasarkan fungsionalnya sebagai Praktisi kehumasan di Pemerintahan kemudian diaamati oleh peneliti melalui perspektif budaya. Karena identitas budaya Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam aktivitasnya melalui sudut pandang nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan Sumedang *Puseur Budaya Sunda* berdasarkan pengalamannya sebagai praktisi humas. Melihat transformasi perkembangan zaman yang semakin modern, melalui kebijakan SPBS ini diharapkan humas juga sebagai praktisi atau moderator komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat masih mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal. Peneliti juga akan mengamati dimensi budaya atau budaya global yang terdapat dalam praktik Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bersumber pada analisis Hofstede. Karena peneliti akan melihat perbandingan antara budaya lokal melalui nilai Sumedang Puseur Budaya Sunda dan juga Budaya Global dari Hofstede.

Sehingga hasil dari penelitian ini besar harapan dapat bermanfaat bagi Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan bahan evaluasi dan juga pembelajaran sejauh mana praktiksi kehumasannya berjalan efektif. Selain itu apakah Pranata Humas Kabupaten Sumedang melibatkan nilai budaya lokal tercantum pada kebijakan SPBS untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang sudah ditetapkan juga

pada Peraturan Daerah (PERDA). Karena praktik Humas dan budaya berpengaruh pada fungsi Humas dalam pemerintah agar bisa menselaraskan tingkah laku masyarakat Kabupaten Sumedang melalui budaya lokal yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian akan dilakukan dengan judul **“Identitas Budaya Praktik Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Nilai *Puseur* Budaya Sunda”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Dibuatnya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pranata Humas Kabupaten Sumedang menjalankan tugas fungsi praktisinya agar tetap berjalan dengan baik meskipun SOTK dalam Pemerintahan telah berubah. Kemudian fungsional yang sudah dilakukan oleh Pranata Humas Kabupaten Sumedang akan diamati melalui pengimplementasian budaya pada diri Pranata Humas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana praktik Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang di Bidang IKP Diskominfo Sanditik?
2. Bagaimana identitas budaya dalam praktik Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang di Bidang IKP Diskominfo Sanditik dilihat dari perspektif karakteristik budaya dan nilai budaya Sunda?

2.1 Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Ilmu yang telah diterima oleh peneliti ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademik khususnya pada program studi Digital Public Relations di Telkom University, khususnya untuk melihat praktik kehumasan dalam perspektif budaya lokal sehingga dapat membantu peran humas sebagai fasilitator komunikasi dengan menerapkan unsur atau nilai sosial budaya

setempat agar hubungan terjalin baik dengan masyarakat dan dapat mendukung kebijakan dari pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang supaya dapat mengembangkan fungsi kehumasannya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar efektif dan menerapkan unsur atau nilai-nilai yang terdapat pada kebijakan Sumedang *Puseur* Budaya Sunda untuk membuktikan bahwa Kabupaten Sumedang mempunyai ciri khas unik dalam budayanya.

b. Bagi Peneliti

Ilmu dan data yang didapatkan pada penelitian ini, serta ilmu yang didapatkan saat perkuliahan berlangsung dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memahami konsep, metode, dan teori dalam melakukan penelitian ini. Sehingga keberhasilan penelitian dapat menjadi salah satu syarat peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Masyarakat di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University.

c. Bagi Pihak Lain

Harapan dari peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak lain yang sedang mempelajari mengenai praktik kehumasan dalam perspektif nilai sosial budaya setempat.

2.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022. Rincian waktu dan periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 (Waktu dan Periode Penelitian)

No.	Tahapan	Waktu /Bulan									
		2022			2023						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Persiapan mencari										

	judul dan topik penelitian										
2	Penelitian lapangan										
3	Proses penyusunan Bab 1, 2, dan 3										
4	Desk Evaluation										
5	Revisi										
6	Penelitian dan pengumpulan data wawancara										
7	Pengelolaan Bab 4 dan 5										
8	Sidang Skripsi										

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)